

Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Politikus Dalam Konteks Skandal Korupsi “BTS (Base Transceiver Station)”

¹Bimaasetya rachmansyah wardana, ²Edy Sudaryanto, ³Novan Andrianto

^{1,2,3}Ilmu Komunikasi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

rachmansyah1927@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze public perceptions of the integrity of politicians in the context of the Base Transceiver Station (BTS) corruption scandal. The BTS corruption scandal is one of the cases that highlights corrupt practices in the technology and communications sector, involving a number of politicians and government officials. This study uses a qualitative method with a case study approach, involving in-depth interviews with various levels of society as well as media analysis regarding the scandal. The research results show that the BTS corruption scandal significantly influenced public perceptions of the integrity of politicians. The majority of respondents considered that the politicians involved in the scandal had betrayed the public's trust and demonstrated a lack of accountability and transparency in carrying out their duties. Apart from that, these findings also indicate that this scandal strengthens the public's negative view of politicians in general, reinforcing the opinion that corruption is still a systemic problem in the world of Indonesian politics. This research emphasizes the importance of efforts to eradicate corruption and increase transparency and accountability in government to restore public trust in politicians. Recommendations put forward include the need for reform in the monitoring and law enforcement system, as well as more intensive anti-corruption education for politicians and the wider community.

Key words: *public perception, politician integrity, corruption scandal, Base Transceiver Station (BTS), accountability, transparency*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap integritas politikus dalam konteks skandal korupsi Base Transceiver Station (BTS). Skandal korupsi BTS merupakan salah satu kasus yang menyoroti praktik korupsi dalam sektor teknologi dan komunikasi, yang melibatkan sejumlah politikus dan pejabat pemerintah. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan wawancara mendalam dengan berbagai lapisan masyarakat serta analisis media terkait skandal tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skandal korupsi BTS secara signifikan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap integritas politikus. Mayoritas responden menganggap bahwa para politikus yang terlibat dalam skandal tersebut telah mengkhianati kepercayaan publik dan menunjukkan kurangnya akuntabilitas serta transparansi dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, temuan ini juga mengindikasikan bahwa skandal ini memperkuat pandangan negatif masyarakat terhadap politikus secara umum, mempertegas anggapan bahwa korupsi masih menjadi masalah sistemik dalam dunia politik Indonesia.

Penelitian ini menekankan pentingnya upaya pemberantasan korupsi dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas dalam pemerintahan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap politikus. Rekomendasi yang diajukan termasuk perlunya reformasi dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum, serta pendidikan antikorupsi yang lebih intensif bagi para politikus dan masyarakat luas.

Kata kunci: persepsi masyarakat, integritas politikus, skandal korupsi, Base Transceiver Station (BTS), akuntabilitas, transparansi

Pendahuluan

Korupsi adalah masalah serius yang memiliki dampak negatif yang luas. Ini dapat merugikan perekonomian, menciptakan ketidaksetaraan sosial, menghambat pembangunan, melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi, dan membahayakan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah dan memerangi korupsi sangat penting dalam membangun masyarakat yang bersih, berintegritas, dan berkeadilan. Banyak negara dan lembaga internasional telah mengadopsi berbagai tindakan dan mekanisme untuk mengatasi korupsi, termasuk pengawasan, undang-undang antikorupsi, dan lembaga khusus yang bertugas memerangi korupsi.

Kasus korupsi tidak hanya dilakukan oleh oknum pejabat namun masyarakat saja dalam kehidupan sehari-harinya banyak yang melakukan tindakan korupsi. Kenyataan itulah yang menjadi salah satu penyebab korupsi sulit diberantas, dan ditambah lagi dengan penegakan hukum yang sangat lemah. Kurangnya hubungan atau tidak adanya persamaan cara pandang pemberantasan korupsi antara lembaga negara membuat penegakan hukum kasus korupsi semakin sulit untuk diselesaikan (Priambodo, dkk 2020) tindak pidana korupsi pada dewasa ini dirasakan semakin merajalela, hal ini dipengaruhi oleh taraf kebutuhan masyarakat yang senantiasa meningkat dalam setiap tahunnya, kebutuhan ekonomi seringkali memberikan efek yang cukup berarti dalam kehidupan Masyarakat.

Oleh karenanya, beberapa masyarakat yang berpikiran instan senantiasa memilih korupsi sebagai jalan keluarnya. Modernisasi dapat memberikan efek yang positif serta negatif dalam kehidupan bermasyarakat, Namun, secara tidak langsung masyarakat telah mengalami kerugian. Keuangan negara yang dikorupsi seseorang yang sejatinya untuk kemaslahatan masyarakat hilang dalam sekejap, masyarakat telah kehilangan hak-haknya untuk menikmati hasil dari kegunaan keuangan negara. Pada hakikatnya aset-aset kekayaan negara merupakan kekayaan yang berasal dari dana masyarakat, sehingga sudah sepantasnya masyarakat berhak atas hasil dari kekayaan negara tersebut. (Atmoko, D., & Syauket, A. 2022).

Kata “Persepsi” seringkali digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yang merujuk pada proses pemberian arti atau makna terhadap informasi, peristiwa, objek dan lainnya yang berasal dari lingkungan sekitar oleh individu atau masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Purwodarminto (1990:759), “persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pengindraan”. Sementara menurut Sugihartono (2007:8), persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia

Persepsi masyarakat adalah cara individu-individu dalam suatu kelompok atau masyarakat memahami, menafsirkan, dan merespons dunia di sekitar mereka. Ini melibatkan bagaimana orang melihat, mendengar, merasa, dan menginterpretasikan informasi yang mereka terima dari lingkungan mereka. Latar belakang tentang persepsi masyarakat melibatkan beberapa faktor yang dapat memengaruhi cara individu atau kelompok masyarakat membentuk pandangan mereka tentang dunia. Beberapa faktor latar belakang yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat termasuk Budaya masyarakat, termasuk nilai, norma, keyakinan, dan tradisi, sangat memengaruhi persepsi mereka. Budaya membentuk kerangka acuan yang digunakan oleh individu untuk memahami dan menilai pengalaman mereka. Pengalaman hidup setiap individu memainkan peran penting dalam membentuk persepsinya. Orang seringkali mengandalkan pengalaman mereka sebagai dasar untuk menginterpretasikan informasi baru.

Media massa, seperti televisi, internet, dan surat kabar, dapat memengaruhi cara masyarakat mempersepsikan berbagai isu dan peristiwa. Media memiliki kekuatan untuk memilih dan menyajikan informasi, yang dapat memengaruhi pandangan masyarakat tentang topik tertentu. Pendidikan juga berperan dalam membentuk persepsi masyarakat. Pendidikan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan perspektif tertentu kepada individu, yang dapat memengaruhi cara mereka memandang dunia. Kelompok sosial seperti keluarga, teman-teman, dan komunitas lokal juga memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi masyarakat. Individu seringkali cenderung memiliki pandangan yang serupa dengan kelompok sosial mereka.

Kata masyarakat berasal dari musyarak (arab), yang artinya bersamasama, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat (Indonesia). Menurut Auguste Comte dalam Abdul Syani (2007:31), "Masyarakat adalah kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan tersendiri" Berdasarkan pernyataan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri dan syarat masyarakat adalah, masyarakat bukan hanya sekumpulan manusia yang hidup untuk kepentingan diri sendiri, namun memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yang diatur berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan

Integritas dalam kepemimpinan menjadi perhatian yang makin berkembang dalam bisnis dan organisasi (Kanungo & Mendonca, 1996). Dunia bisnis menjadi ajang pertarungan tentang komitmen menjunjung tinggi nilai-nilai etis di tengah-tengah perburuan meraih sukses dilihat dari tolok ukur ekonomi yang kasat mata. Dunia bisnis memberikan banyak peluang untuk bisa melakukan segala cara demi meraih keuntungan sebagai tolok ukur utama keberhasilan. Makin besar suatu bisnis, akan makin besar peluang untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, termasuk dengan mengabaikan kewajiban-kewajiban etis yang mengikatnya untuk diamankan.

Tokoh politik memegang peran penting dalam membentuk kebijakan dan mengawasi pemerintahan. Oleh karena itu, integritas mereka adalah faktor kunci dalam memastikan kebijakan yang adil, tata kelola yang bersih, dan pelayanan masyarakat yang baik. Namun, dalam beberapa kasus, skandal korupsi dan pelanggaran etika telah merusak reputasi tokoh politik. Integritas seorang tokoh politik merujuk pada aspek-aspek yang memengaruhi kemampuan seorang politikus untuk menjaga dan mendemonstrasikan integritas dalam kariernya. Integritas politikus sangat penting karena melibatkan kejujuran, etika, dan moral dalam tindakan dan keputusan politik. Dengan demikian, dampak dari kasus korupsi sangat serius dan bisa merusak karier politik dan

reputasi seorang tokoh politik. Oleh karena itu, integritas dan kepatuhan pada aturan etika dan hukum sangat penting bagi mereka yang berkecimpung dalam politik.

Salah satu kasus korupsi yang pernah menggemparkan rakyat Indonesia adalah kasus korupsi BTS 4G yang melibatkan kominfo. Dalam kasus ini, terjadi dugaan korupsi dalam proyek pengadaan infrastruktur jaringan telekomunikasi 4G oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia. Terdapat tuduhan bahwa sejumlah pejabat dan pihak terkait menerima suap dari perusahaan penyedia layanan telekomunikasi dalam proses penentuan pemenang kontrak. Salah satu orang yang terlibat Johnny G. Plate dijadikan sebagai tersangka dugaan korupsi proyek BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1,2,3,4, dan 5 BAKTI Kominfo tahun 2020 - 2022 (Indonesia Corruption Watch, 2023). Kemudian, menurut BPKP (2023) total kerugian dari dugaan kasus korupsi ini mencapai Rp8.032.084.133.795,51 atau sekitar 8 triliun rupiah. Hal ini tentu saja merugikan keuangan negara dalam skala masif. Kasus korupsi BTS 4G ini juga merupakan salah satu contoh yang mencerminkan faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan korupsi di Indonesia. Selain faktor yang dipaparkan dalam berita, faktor politik juga dapat menjadi pendorong utama. Kasus ini melibatkan sejumlah pejabat tinggi, termasuk Johnny G. Plate (JGP), yang memiliki peran penting dalam proses penentuan pemenang kontrak. Adanya tekanan politik atau intervensi politik dalam pengadaan proyek dapat menciptakan peluang bagi tindakan korupsi, terutama jika pejabat-pejabat tersebut merasa terlalu kuat dan tidak akan dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka

Jika tidak segera diatasi permasalahan tersebut akan menghambat proses kemajuan sebuah negara dan berdampak bagi masyarakatnya, pemerintah telah berusaha untuk mengatasi korupsi melalui berbagai langkah, termasuk pembentukan lembaga anti-korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan perubahan regulasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, upaya-upaya tersebut masih terus berlanjut untuk mengurangi tingkat korupsi dan mempromosikan integritas dalam pemerintahan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif eksploratif dan eksplanatif subyek penelitian terdiri dari individu dalam keluarga dan kelompok social lainnya. Objek penelitian mencakup pengetahuan, sikap, kesadaran masyarakat, dan respon masyarakat terhadap tindak atau pidana korupsi dari data itu dikonstruksi pemahaman masyarakat menurut perbedaan dan kesamaan pengetahuan, sikap, kesadaran dan respon mereka terhadap tindak korupsi.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini memberikan wawasan mendalam mengenai berbagai aspek yang telah dieksplorasi, dan pembahasan ini bertujuan untuk menganalisis serta menginterpretasikan temuan-temuan tersebut. Melalui pemaparan data yang komprehensif, kami akan mengulas implikasi dari hasil-hasil yang diperoleh serta relevansinya dengan hipotesis yang telah dirumuskan. Selain itu, diskusi ini juga akan mengaitkan temuan dengan literatur yang ada, mengidentifikasi keterbatasan penelitian, dan memberikan saran untuk penelitian di masa depan. Dengan demikian, bagian ini akan memberikan gambaran yang holistik tentang bagaimana hasil penelitian ini berkontribusi terhadap pemahaman kita dalam bidang studi yang relevan.

Penutup

Penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi masyarakat terhadap integritas politikus dalam konteks skandal korupsi pembangunan BTS (Base Transceiver Station). Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui survei dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa skandal ini telah berdampak signifikan terhadap pandangan masyarakat terhadap para politikus yang terlibat. Masyarakat secara umum memiliki pandangan negatif terhadap integritas politikus, yang dipandang cenderung tidak jujur dan mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok dibandingkan dengan kepentingan publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat merasa kecewa dan marah terhadap tindakan korupsi yang dilakukan oleh politikus dalam proyek pembangunan BTS. Skandal ini tidak hanya mengikis kepercayaan masyarakat terhadap politikus, tetapi juga terhadap lembaga-lembaga pemerintahan yang seharusnya mengawasi dan mencegah tindakan korupsi. Responden penelitian ini menganggap bahwa kurangnya transparansi dan akuntabilitas merupakan faktor utama yang memungkinkan terjadinya korupsi dalam skandal BTS.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa masyarakat memiliki harapan besar terhadap adanya reformasi dalam sistem politik dan pemerintahan. Mereka menginginkan adanya penegakan hukum yang lebih tegas dan independen terhadap politikus yang terlibat korupsi. Masyarakat juga mendesak adanya perbaikan dalam mekanisme pengawasan proyek-proyek pemerintah untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Soemanto, R. (2014). Pemahaman masyarakat tentang korupsi. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(1).
- Haryanto, H. C., Rahmania, T., Mubarok, A. R., Dopo, A. B., Fauzi, H., & Fajri, E. (2015). Bagaimanakah Persepsi Keterpercayaan Masyarakat terhadap Elit Politik?. *Jurnal Psikologi*, 42(3), 243-258.
- Purnomo, D. (2019). Survei Persepsi Generasi Muda terhadap Integritas dan Anti Korupsi Tahun 2017. *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial*, 8(1), 85-110.
- Kurniawan, F., & Handayani, R. S. (2022). Masalah Pelaksanaan Fungsi Partai Politik dan Dampaknya Terhadap Konsolidasi Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, 4(2), 128-145.